

KRISIS KEUANGAN *EUROZONE*: Studi Ekonomi dan Perbankan Islam

Muhammad Zulhilmi

Mahasiswa Doktor Islamic Economic and Finance

Universitas Trisakti

muha.zul@gmail.com

ABSTRAK

Krisis yang terjadi akibat dari kekurangan likuiditas dengan penggelembungan aset, menyebabkan Pemerintah melakukan pinjaman hutang untuk mengembangkan konsep welfare state yang pernah dipopulerkan di eurozone. Akibatnya, pinjaman terus meningkat tanpa dibarengi investasi riil ekonomi makro. Dalam lembaga keuangan Islam, transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan memperkuat sistem keuangan internasional, karena aset memberikan kontribusi terhadap stabilitas keuangan negara. Institusi perbankan terus diawasi dan bahkan melakukan kerjasama dengan melakukan inisiatif untuk memperkuat stabilitasnya dengan membangun kerjasama pengawasan seperti: the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute, the Islamic Financial Services Organization, International Islamic Financial Market dan Islamic Rating Agency. Lembaga-lembaga ini akan memperkuat arsitektur keuangan Islam internasional dan mempromosikan stabilitas keuangan Islam yang lebih besar.

Kata Kunci: *Krisis, Keuangan, Eurozone, Ekonomi dan Perbankan Islam*

ABSTRACT

Crisis arising from the lack of liquidity with asset bubbles, causing the government borrow loans to develop the concept of welfare state that once popularized in the eurozone. As a result, the loan continues to increase without any real investment coupled macroeconomics. In Islamic financial institutions, transparency and accountability of financial institutions strengthen the international financial system, because the assets contributed to the country's financial stability. Banking institutions continue to be supervised and even cooperate with initiatives to strengthen stability by building cooperation supervision such as: the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute, the Islamic Financial Services Organization, the International Islamic Financial Market and Islamic Rating Agency. These institutions will strengthen the international Islamic financial architecture and promote the stability of the larger Islamic finance.

Keywords: *Crisis, Finance, Eurozone, Economy and Islamic Banking*

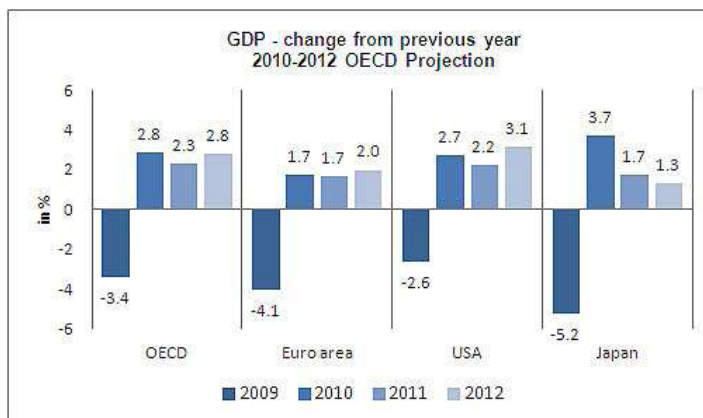
Pendahuluan

Krisis keuangan tahun 2008-2009 terjadi akibat kekurangan likuiditas (*liquidity shortfall*) di Amerika Serikat karena penggelembungan nilai aset (*asset over valuation*). Akibat dari penggelembungan aset mengakibatkan lembaga keuangan mengalami kesulitan modal sehingga menimbulkan kebangkrutan. Beberapa waktu setelah itu, perekonomian Eropa mengalami dampak

efek dari krisis di Amerika Serikat, dampak dari krisis ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatnya pengangguran dan yang lebih buruk lagi berdampak negatif di sektor perdagangan global.

Krisis yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara *eurozone* berada pada tingkat level negatif, walaupun kemudian pertumbuhannya meningkat pada level positif di tahun berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1: Proyeksi Pertumbuhan 2009-2012



Sumber : OECD, 2010

Yunani merupakan salah satu negara dalam *eurozone* dengan populasi penduduk sekitar 11 juta jiwa dan pendapatan perkapita US\$22.000 juta. Meskipun Yunani negara kecil, namun Yunani dapat menyumbangkan 2.6 % GDP di *eurozone*. Sehingga muncul istilah untuk Eurozone sebagai Uni Eropa yang selalu dinilai sebagai suatu kerja sama ekonomi berbasis kawasan yang paling ideal dan paling sukses di dunia (Budi, 2011: 100).

Ekonomi merupakan salah faktor terpenting di setiap negara, karena apabila terjadi krisis di suatu negara akan memberikan dampak buruk terhadap kestabilan ekonomi dan keuangan pada negara tersebut. Oleh karena itu, isu-isu keuangan, perdagangan yang dapat memperburuk ekonomi makro secara global harus secepatnya diatasi.

Kalau kita cermati situasi ekonomi global yang semakin memburuk pada tahun 2008 di Amerika, krisis ini berpengaruh terhadap beberapa negara di dunia yang mengakibatkan terjadi resesi terburuk di eropa seperti Yunani. Krisis ini semakin terasa pada tahun 2009, hal ini disebabkan mata uang Yunani (*drachma*) mengadopsi mata uang eropa (*Euro*). Pada prinsipnya, Yunani belum memenuhi persyaratan untuk bergabung dalam *eurozone* yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi Yunani jatuh tidak stabilnya (Akram, Noreen & Karamat, 2011: 306-318).

Banyak kalangan membicarakan krisis ekonomi Yunani yang terjadi pertengahan tahun 2010, krisis keuangan seringkali diidentikan dengan krisis ekonomi. Dalam memahami krisis keuangan tidak hanya dilihat dari tingkat laju export-import melainkan harus dilihat lebih jauh dari perkembangan ekonomi suatu negara baik dari sisi sistem perbankan, bisnis maupun kebijakan moneter.¹ Begitu juga dengan fenomena krisis yang terjadi di Yunani karena hutang yang tidak bisa di bayar pada *International Monetary Fund* (IMF) yang mengalami defisit serta kondisi ekonomi makro yang tidak menentu. Krisis ini terjadi akibat kebablasan hutang yang mendera Yunani dan ini bukan yang pertama kali terjadi seperti pada masa Raja Dionisius the Elder yang berkuasa pada tahun 407-367 SM (Guidotti, 2012).

Kebijakan yang diambil pemerintah masa lalu dalam mengakumulasi kesalahan kebijakan pemerintah, mengakibatkan dampak buruk terjadi pada pemerintahan berikutnya. Pemerintah baru dengan memberanikan diri membuat pinjaman (hutang) untuk membiayai subsidi, dana pensiun dan gaji pegawai. Pemerintah melakukan pinjaman hutang untuk mengembangkan konsep *welfare state* yang mereka populerkan terutama *eurozone*.

Pada tahun 2010, Yunani mencicil pelunasan hutang pada Goldman Sach dan Bank Investasi untuk mengatur ulang transaksi dengan merevisi statistik ekonomi makro sehingga yang ditampilkan statistik ekonomi makro yang baik. Namun, pada bulan Mei 2010 Yunani terjadi defisit hingga 13.6%. Defisit ini terjadi paling banyak pada kasus penggelapan pajak mencapai US\$ 22 milyar per-tahun.

Krisis Yunani akhirnya menjadi sebuah isu panas, secara stimulus krisis Yunani merupakan krisis Euro yang menjadi perhatian dunia internasional. Yunani bagian dari negara *eurozone*, banyak negara tetangga memberikan perhatian untuk mencari dana pinjaman antara sesama negara *eurozone* dan IMF untuk menstabilkan keadaan ekonomi.

Menggunakan *euro* sebagai mata uang tunggal untuk negara-negara *eurozone* menjadi malapetaka. Disatu sisi, *eurozone* mendatangkan keuntungan dan menambahkan *bargaining position* negara eropa. Disisi lain, negara *eurozone* mendatangkan masalah, seperti kurangnya tingkat mengadaptasi dari satu negara dengan negara *eurozone* lainnya. Hal ini terjadi karena tidak semua negara menyetujui sistem moneter dalam perekonomian mengikuti sistem *eurozone*.

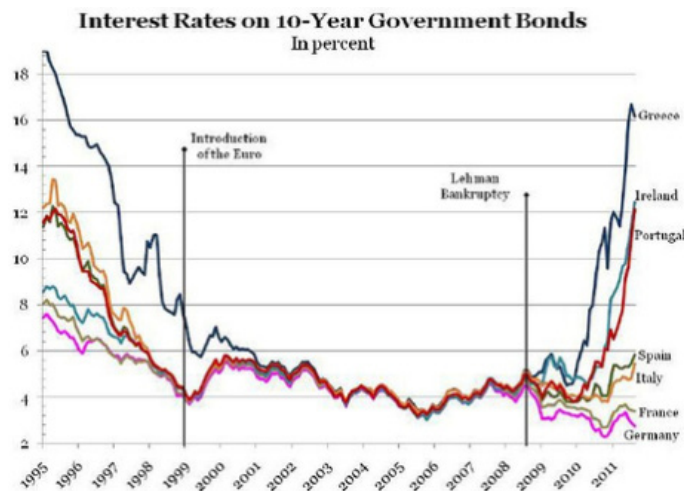
Dalam tatanan ekonomi global terutama negara *non-eurozone* tidak terjadi dampak krisis secara langsung dan bukan berarti tidak ada. Pengaruh terbesar terjadi pada masyarakat negara-negara *non-eurozone* yang sangat sulit mengakses nilai mata uang dan tekanan di sektor perbankan. Selain tekanan kebijakan moneter dan finansial sehingga negara-negara tersebut mengalami kesulitan dalam pemasukan negara termasuk asia sebab tingkat perdagangan multi nasional sesama negara Eropa sangat tinggi.

Hutang dan Realisasi Ekonomi

Krisis keuangan menyebabkan peningkatan hutang di negara-negara maju. Hal ini dapat kita lihat dari *subprime mortgage* kredit tahun 2007 di pasar USA yang menyebabkan terjadinya krisis negara-negara *eurozone* (Georgios, Vlamis, Prodromos, 2010: 391-404). Hutang ini merupakan hutang swasta di pasaran global sehingga menjadi hutang publik. Hutang ini berubah dengan cepatnya dalam kenaikan tingkat suku bunga, jika hutang tidak bisa direalisasikan dalam bentuk real di sektor ekonomi maka akan menjadi kerentanan yang berkelanjutan (Marmen M, Rogoff, 2010: 537-8).

Eurozone sangat bervariasi kondisi ekonomi, baik dilihat dari sisi GDP, tingkat suku bunga, produktivitas negara (masyarakat), sampai pada tataran luasnya wilayah. Kondisi ini mengakibatkan anggapan bahwa negara *eurozone* memiliki kesamaan dalam tingkat suku bunga. Anggapan ini berbalik sehingga terjadi *convergence* terhadap suku bunga. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

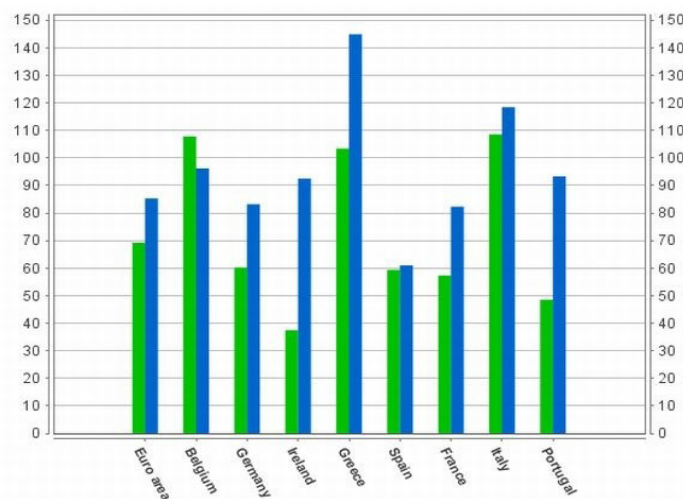
Gambar 2 : Tingkat Suku Bunga Negara *Eurozone*



Sumber: Jacob Goldstein, Nov 15, 2012

Krisis yang berdampak buruk terhadap beberapa negara *eurozone* seperti Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia dan Portugal karena sulit untuk dapat melunasi hutang-hutang mereka. Hal terjadi karena rasio PDB terhadap hutang lebih tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 3: Krisis Hutang Eropa



Sumber : www.washingtonpost.com, access Nov 16, 2012

Sedangkan Angel Gurria (2012) berpendapat bahwa krisis di *eurozone* terjadi akibat akumulasi dari ketidakseimbangan fiskal, ekonomi, perbankan dan pasar keuangan secara keseluruhan pada siklus kredit berada pada titik balik (OECD, 2012). Sedangkan Ghafour (2008) menyebutkan bahwa krisis ini di picu akibat lemahnya pengawasan sektor keuangan dan tingkat suku bunga rendah sehingga memicu kenaikan kredit konsumsi untuk pembelian property (*housing mortgages*) yaitu mencampurkan hutang *prime* dengan *subprime* (Ahmed, 2010: 306-320). Hal ini sangat spektakuler karena Yunani berani menjual hutang yang di jamin oleh CDO dengan menanggung resiko default ke pembeli terakhir tanpa persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan dan perbankan. Dari hutang publik perbankan sehingga pemerintah dipaksakan untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah dengan mengambil alih hutang yang terdapat di bank-bank yang bermasalah. Disamping itu, pemerintah membuat kebijakan fiskal dan moneter secara ekspansif dengan program stimulus

untuk meningkatkan permintaan agregat dengan mensetting statistik sehingga ekonomi mereka nampak tidak jatuh dalam resesi yang dalam.

Krisis hutang yang terjadi di eurozone menjadi pertanyaan apakah layak eurozone menjadikan euro sebagai mata uang tunggal? kita melihat bahwa krisis yang terjadi di eurozone masih berlangsung, hal ini disebabkan: 1). Irlandia sampai saat ini masih meminta bantuan keuangan dan mekanisme keuangan pada Uni Eropa dan IMF. 2). Dalam 10 tahun terakhir imbas dari hasil obligasi pemerintah Portugal dan Spanyol terjadi peningkatan secara signifikan sehingga di khawatirkan terjadinya efek dominan potensial eurozone (Carmen M., & Rogoff, 2009: 466-472).

Krisis keuangan berdampak terhadap institusi perbankan yang terkait langsung dengan hutang publik, hal ini mengakibatkan terjadinya restrukturisasi untuk hutang publik dan swasta. Tentu saja pola ini salah satu dominan yang dilakukan pada era mega-bail-out pada masa krisis perbankan di Jepang, krisis peso di Meksiko, hal ini diperkuat karena krisis di Asia yang mengakibatkan imbasnya pada ekonomi domestik dan ekonomi internasional. Pada bail out ke II yang terjadi di Amerika Serikat dalam menanggulangi krisis *sub-prime mortgage* sehingga menjadi krisis hutang paling serius semenjak tahun 1930-an (Reinhart & Rogoff, 2011)

Setelah perang dunia ke-II, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki hutang tertinggi, termasuk juga Australia, Kanada. Inggris merupakan negara nyata dalam berhutang, di mana PDB publik / hutang sampai 240% pada tahun 1948. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Reinhart & Rogoff, 2010)

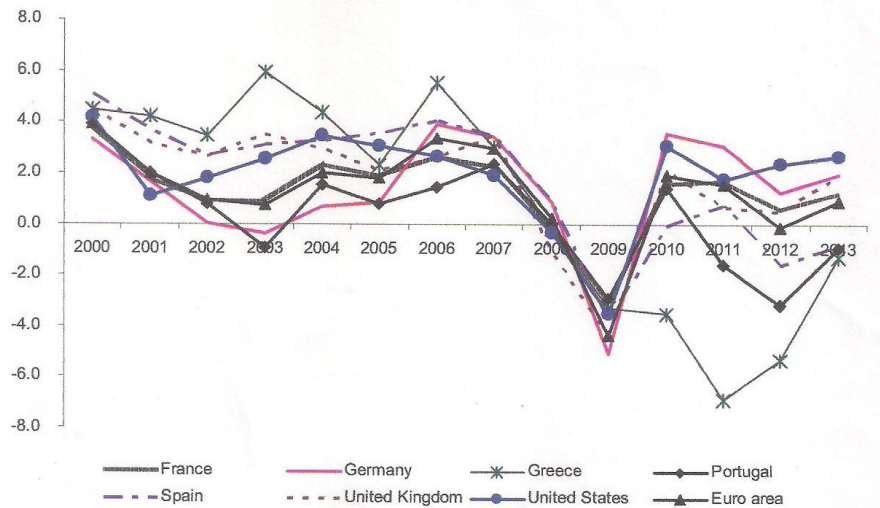
- Tahun 1920-an dan 1980-an hingga saat krisis terjadi di Belgia
- Tahun 1920 krisis di Prancis
- Tahun 1920, 1930-an dan 1990-an sampai sekarang krisis di Yunani
- Tahun 1980 krisis terjadi di Irlandia
- Tahun 1990-an krisis terjadi di Italia
- Pertengahan abad terakhir sampai pada periode antara masa perang dan sebelum 1860-an krisis terjadi di Inggris
- Pada dekade terakhir krisis terjadi di Jepang

Gambaran krisis tersebut di beberapa negara menuntut pemerintah agar secara cepat untuk mengurangi resiko hutang yang di gulirkan dan mengekang kenaikan bunga terhadap beban hutang secara substansial, dan pemerintah meninjau kembali terhadap restrukturisasi secara cermat sehingga mendatangkan kebangkitan sektor keuangan (William R, 1989, 91-113)

Dalam restrukturisasi, pemerintah harus meninjau secara ambang batas dan non-linearitas sebagai kunci memahami pertumbuhan ekonomi dan hutang dipandang sebagai re-interpretasi pembangunan ekonomi. Artinya siapapun yang melakukan pekerjaan harus benar-benar sadar bahwa data real sangat diperlukan, jangan melakukan dengan konsep dan data samar-samar seperti hutang tinggi, *over-valued*. Hutang tinggi atau *over-valued* adalah fakta bukan tafsiran guna untuk memudahkan kontrolan dari pemerintah dalam memetakan resesi ekonomi.

Namun demikian, *eurozone* tetap berkeyakinan bahwa program konsolidasi fiskal untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan anggaran. Implementasi *austerity measures* benar-benar dilakukan secara total. Hal ini terbukti apa yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengedepankan program-program jaminan sosial, ketenagakerjaan dan isu pensiun. Pemerintah melakukan untuk mengurangi resiko kejatuhan pendapatan pemerintah. Dalam hal ini, *eurozone* berupaya secepatnya untuk mendukung pemulihan krisis ekonomi bagi setiap negara-negara Eropa yang terkena krisis ataukah akan mencari alternatif solusi untuk mendukung pemulihan krisis.

Gambar 4: Tren Pertumbuhan Ekonomi Eurozone



Sumber : OECD, 2012

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa negara-negara di kawasan *eurozone* yang terparah krisis adalah Yunani, Portugal dan Spanyol, namun demikian negara ini masih memiliki prospek pertumbuhan ekonomi positif kedepan. Krisis ekonomi *eurozone* bukan semata-mata karena isu pertumbuhan ekonomi, melainkan isu politik perdagangan global terutama harus konsisten melakukan konsolidasi fiskal secara serius dan kontenyu.

Krisis Yunani dan Tantangan Masa Depan Eurozone

Krisis keuangan dan perbankan *eurozone* merupakan krisis yang terus berlanjut sehingga membuat kesulitan bagi pemerintah, bahkan hampir kesulitan tersebut turut dirasakan negara-negara Eropa yang terkena krisis untuk menyelesaikan permasalahan fiskal dalam negeri tanpa ada bantuan dari negara donor (Haidar, 2012: 123-136). Hal ini disebabkan peningkatan hutang secara global (*world total debts*) baik hutang masyarakat maupun hutang pemerintah.

Krisis Yunani merupakan lembaran hitam pembangunan ekonomi di sektor keuangan dan perbankan yang terus terpuruk selama tahun 2010 sehingga ekonomi negara semakin kacau dalam wilayah *eurozone* (Thomas L, and Schwartz N., D. 2010). Yunani menjadi negara yang menakutkan dalam pengelolaan defisit sektor keuangan dan pendapatan GDP akibat dari hutang. Estimasi skenario ekonomi terus dilakukan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan perbankan negara dengan beberapa alternatif berupa: Yunani harus meninggalkan *eurozone*, *bail out* akan menjadi lebih baik atau malapetaka, *eurozone* harus dilibatkan diseluruh negara tetangga (utara-selatan) (Easterly, William R, 1989),

Disisi lain, negara-negara yang tergabung dalam *eurozone* memberikan perhatian secara serius terhadap krisis. Hal ini tercermin dalam pertemuan G20, konsentrasi berfokus pada: *Pertama*, memberikan rancangan penanganan masalah keuangan dan stabilitas keuangan bagi *eurozone* oleh negara-negara Uni Eropa. *Kedua*, memperkuat peran IMF dan komitmen untuk memberikan kontribusi dana kepada IMF jika diperlukan. *Ketiga*, mendukung penciptaan lapangan kerja, proteksi sosial dan pelbagai tantangan ekonomi global (Pakpahan, 2011).

Kalau kita melihat indikator terjadinya krisis Yunani adalah politik dalam menempatkan kelemahan endemik dari pemerintah dan dasar-dasar sistemik yang menghalangi konsensus sosial dalam mereformasi struktural. Hal ini dapat kita lihat bahwa Yunani telah mempertahankan

kontrol fiskal dan regulasi hutang pada akhir tahun 1990-an karena memanfaatkan keanggotaannya di *eurozone* (Wignall & Slovik, 2011: 28). Kontrol yang dilakukan bukan menggunakan data valid, melainkan melakukan mark-up hutang dengan kontrol statistik yang baik sehingga ekonomi, keuangan dan perbankan negara selalu terlihat baik. Hal ini dapat kita lihat dari *Hellenic Statistical Authority* (BPS-nya Yunani), pertumbuhan ekonomi Yunani pada kuartal II 2011 kembali minus 7.3 % dan tingkat pengangguran pada periode ini sampai 16.3 %.

Tragedi perekonomian Yunani merupakan tanggung jawab utama terletak pada pemerintah karena lemahnya sistem politik sehingga menyebabkan amburadulnya manajemen konstan dari perekonomian domestik sehingga menanjaknya peningkatan hutang pemerintah pada level tertinggi, dan jauh lebih tinggi dari hutang negara *eurozone*, tingkat hutang publik Yunani ini menjadi lebih dari 100% dari nilai PDB (Kouretes & Vlamis, 2010).

Untuk itu, Yunani harus mendesain kembali kebijakan ekonomi, keuangan dan perbankan khususnya sektor fiskal. Disamping itu, untuk meringankan beban Yunani dan kelangsungan *eurozone*, Uni Eropa dan IMF harus memberikan likuiditas untuk penyelamatan ekonomi Yunani. Selain itu, pasar keuangan khususnya lembaga kredit harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Kegagalan kredit ini menyebabkan timbul reaksi yang berlebihan dalam mengungkapkan potensi hutang yang bermasalah.

Kondisi ekonomi dan perbankan Yunani berdampak sistemik pada krisis keuangan khususnya wilayah *eurozone*. Pemimpin di Uni Eropa menawarkan opsi untuk memberi dukungan bagi Yunani meninggalkan wilayah *eurozone* sebagai pilihan terakhir dan mencegah meluasnya krisis keuangan. Di samping itu, Uni Eropa memperkuat peran IMF sebagai pelaksana *precautionary and liquidity line* (PLL). PLL ini ditujukan untuk memberikan bantuan dana cair dan fleksibel dalam waktu singkat sesuai kasus per-kasus per-negara yang terkena dampak krisis ekonomi eksternal yang sistemik.

Dampak buruk terhadap perkembangan ekonomi *eurozone* dan isu-isu sosial mulai dipecahkan, terutama pada penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan isu sosial lainnya menjadi masalah krusial karena melambatnya pertumbuhan ekonomi *eurozone* dan Amerika Serikat yang mengakibatkan populasi pengangguran terus meningkat, misalnya di UK (8,1 %), Perancis (9,9 %), Jerman (5,9%), *eurozone* (9,7%), Spanyol (22,6%), Yunani (17,6%), dan Amerika Serikat (9,1%) (Eurostart, 2011)

Sampai saat ini belum terlihat perbaikan ekonomi di Eropa, kalangan masyarakat Eropa kian kritis. Krisis ekonomi dan sosial dapat memberikan momentum kebangkitan separatisme *catalunia* kawasan timur. Hal ini disebabkan meningkatnya episentrum politik, sosial, budaya dan sekaligus persepak bola, mengingat kehidupan masyarakat makin terjepit sehingga urbanisasi tidak menjadi konflik internal masyarakat.

Krisis Keuangan Global dan Perbankan Islam

Krisis keuangan yang terjadi di *eurozone* memberikan efek buruk terhadap perkembangan sektor keuangan dan perbankan. *Pertama*, lembaga keuangan lebih berhati-hati (tidak bersedia) memberikan pinjaman uang, menaikkan bunga pinjaman. Nilai obligasi dunia terhadap hipotek penjualan jatuh dari \$1.9 miliar pertahun menjadi \$500 Juta pada tahun 2008. *Kedua*, banyak lembaga keuangan telah hancur terutama dalam melakukan pembiayaan *inisiatif industri swasta* (PFI), banyak asuransi seperti monoline yang menjamin obligasi khususnya dalam menggumpulkan modal untuk pembiayaan proyek-proyek PFI karena membeli kredit mortgage-backed securitas telah kehilangan kredibilitas untuk menjamin penerbitan obligasi (Stephen. G, 2008).

Perbankan Islam secara modern terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi global. Alquran telah menawarkan konsep ekonomi makro dengan melahirkan nilai-nilai keadilan dan sosial, dalam ekonomi dan keuangan Islam baik ekonomi makro maupun mikro harus bebas dari nilai-nilai bunga (Mohamed, 1988: 46).

Memahami Ekonomi dan Keuangan Islam

Kita harus berkeyakinan bahwa dalam Islam sudah diatur seluruh aspek kehidupan bagi setiap muslim. Baik yang sifatnya hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia. Islam juga sudah mengatur moralitas dan perilaku serta memberikan aturan kehidupan yang baik dan sempurna. Hukum Islam (syariah) yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah mengatur semua kegiatan ekonomi dan sosial kegiatan perekonomian manusia.

Sistem dan model ekonomi Islam terus berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan aturan (syariah) yang sudah diaturkan dalam Alquran maupun dalam al-Sunnah, baik transaksi komersil maupun keuangan lainnya. Kerangka dan sistem keuangan Islam sebagai mana di jelaskan oleh Ainley (2007), sebagai berikut:

- a. Model ekonomi dan keuangan Islam sangat menekankan pada keadilan, hal ini terlihat bahwa setiap objek transaksi harus tercapai prinsip keadilan dan kejujuran. Pada tingkat makro ekonomi, model pembiayaan dalam Islam benar-benar bertujuan tercapainya kemakmuran ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan mengurangi penguasaan kekayaan pada segelintir orang yang mungkin merugikan masyarakat lain.
- b. Islam mengakui hak-hak individu untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi secara jelas, dimana harus membedakan mana yang dibenarkan dan dilarang oleh syariah.
- c. Syariah secara jelas ditegaskan bahwa riba sangat dilarang. Dalam sistem keuangan dan perbankan Islam modern telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk menggantikan pendapatan bunga dengan arus kas dari sumber produktif.

1. Krisis Keuangan dan Tantangan Perbankan Islam (*Financial Crisis and Challenges Facing Islamic Banking*)

Krisis keuangan yang terjadi secara luas mengakibatkan gangguan di pasar keuangan sehingga menimbulkan kendala terhadap aliran kredit untuk keluarga, bisnis yang menimbulkan efek buruk terhadap sektor riil dan jasa. Istilah ini lazim digunakan untuk para investor secara tiba-tiba kehilangan sejumlah investasinya dan lembaga keuangan tiba-tiba kehilangan proporsi yang signifikan dari nilai investasi para investor. Krisis keuangan dapat terjadi dalam beberapa segmen pasar, yaitu: crash pasar saham, buble ekonomi, krisis mata uang dan defaults nilai tukar.

Gelembung (*bubble*) ekonomi umumnya terjadi karena kemudahan dalam memberikan kredit rumah tangga, hutang yang berlebihan, spekulasi, keserakahan, penipuan, dan korupsi (Ariff, 1998). Kemudahan dalam memberikan kredit menyebabkan hilangnya disiplin dalam nilai pasar yang memadai, pada akhirnya terjadi *intigates* pinjaman dengan kebijakan yang tidak bijaksana.

Penciptaan hutang dalam sistem keuangan Islam harus didukung oleh barang dan jasa. Instrumen hutang tidak mudah untuk diperdagangkan kecuali dibarengi oleh barang dan jasa tertentu untuk menghindari atau berjaga-jaga apabila terjadi fluktuasi. Barang dan jasa merupakan hal yang fleksibel dalam sistem moneter Islam. Oleh karena itu, efek spekulasi akan mendestabilisasi pembatasan secara signifikan. Sistem moneter dalam model keuangan Islam berkaitan langsung dengan komoditas dan jasa. Dengan kata lain, dikotomi antara aktivitas keuangan berjalan secara

riil, keuangan secara langsung dialokasikan untuk keperluan tertentu terhadap barang dan jasa (Ali, 2000: 147).

Dari beberapa kajian para ahli, penyebab utama krisis keuangan disebabkan oleh kelemahan standar pinjaman yang diadopsi oleh lembaga keuangan termasuk juga perbankan yang didorong oleh keserakahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, dan juga kurangnya control oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang memadai (Rasem N&M. Kabir Hassan, 2009). Hal ini juga dipicu oleh pemberian kredit untuk usaha kecil dengan pendapatan masyarakat terendah, diperburuknya lagi karena perbankan tidak melakukan selektif dengan cermat bagi pemohon kredit dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan adat masyarakat setempat dalam kerangka pengembangan ekonomi.

Krisis keuangan telah terbukti secara nyata bahwa kekuatan dari pasar uang modern sebagai cikalbakal kapitalisme adalah sebuah ilusi. *Mood happy-go-luck bable* seketika karena kenaikan dan inflasi mendorong harga naik secara global seketika tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah.

2. Keuangan Islam dan Penciptaan Uang (*Money Creation and Islamic Financing*)

Krisis keuangan yang terjadi menimbulkan pemikiran ulang terhadap industri perbankan. Hal ini menyebabkan untuk meninjau kembali sistem kapitalisme dalam penataan sistem keuangan yang mendukung penciptaan uang dan uang. Penciptaan uang merupakan model dalam menyuntikan modal sehingga memicu masalah besar di dunia perbankan.

Prinsip-prinsip keuangan Islam memberikan kontribusi yang besar untuk membangun sistem keuangan dan perbankan dunia. Namun, di sini harus dibedakan dari prinsip-prinsip industri perbankan, karena industri perbankan dan keuangan Islam masih relatif muda. Survey dari dunia perbankan Islam bahwa penciptaan uang sampai saat ini masih berdasarkan model persamaan ekonomi dan perbankan konvensional.

Dalam penciptaan uang, negara dan lembaga keuangan negara memiliki peran aktif, baik dalam mengurus sistem moneter maupun mengurus sistem bank sentral yang memiliki kebijakan untuk sistem fiskal dan moneter. Keduanya merupakan entitas kunci yang berhubungan dalam pencetakan dan penciptaan uang. Dengan demikian, bank sentral menggunakan obligasi pemerintah sebagai aset dalam penerbitan mata uang.

Penciptaan uang dalam sistem moneter Islam sebagai jalan alternative untuk menghubungkan penciptaan uang dengan penerbitan hutang. Prinsip keuangan Islam dalam proses pembuatan uang menggunakan produk ekuitas dimana melakukan penerbitan mata uang bukan surat hutang. Jika instrument moneter Islam masih menggunakan sistem kapitalisasi (*project concept notes*) yang digunakan untuk pembuatan uang dan penerbitan, maka bank sentral bisa memanfaatkan pemerintah dari pada meminjamkan kepada pemerintah. Dengan demikian, ekuitas seperti alat monetisasi tidak menjanjikan bunga tetap, melainkan pengembalian yang di bayar dalam bentuk deviden surplus berbagai keuntungan yang mereka terima.

Tabel 1: Neraca Badan Moneter Arab Saudi (SAMA)

Assets (£m)		Liabilities (£m)	
Gold	1.623.502.620	Notes Issued	107.897.106.915

Assets (£m)		Liabilities (£m)	
Foreign Currencies	106.509.903.504	Coins Issued	236.299.245
Total Assets	108.133.406.160	Total Liabilities	108.133.406.160

Source : SAMA balance sheet, as of June 2008

Krisis keuangan seperti yang melanda *eurozone* tidak akan terjadi jika persyaratan sistem keuangan Islam diterapkan, misalnya masalah berbagi resiko. Lembaga perbankan komersil mau berbagi keuntungan dan resiko, baik dalam investasi (hipotik), lembaga perbankan lebih berhati-hati dalam memilih penawaran untuk pembiayaan karena keuntungan finansial tergantung pada kinerja proyek.

Dalam ekonomi Islam, bank syariah bertindak sebagai perusahaan modal dalam mengumpulkan kekayaan masyarakat dan diinvestasikan dalam perekonomian nyata, keuntungan yang didapati oleh bank akan didistribusikan kepada deposan. Bank Syariah bertindak sebagai mitra investasi bagi investor yang memerlukan modal dalam melakukan bisnis. Bank hanya bisa menutupi modal awal dengan menjual bagian mereka dari hipotek/bisnis pada nilai pasar yang berlaku. Sebagai mitra nyata, bank syariah harus memiliki asset riil dan konsekuensi dalam berbagi resiko.

Kesimpulan

Ekonomi merupakan salah faktor terpenting di setiap negara, apabila krisis melanda negara lain tentu sangat terpengaruh terhadap kestabilan ekonomi dan keuangan domestik. Oleh karena itu, isu-isu keuangan, perdagangan yang dapat memperburuk ekonomi makro secara global harus secepatnya disikapi.

Dalam memahami krisis keuangan tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekspor-impor melainkan harus dilihat perkembangan ekonomi dari sisi sistem perbankan, investasi maupun kebijakan moneter. Fenomena krisis Yunani karena hutang yang tidak bisa di bayar pada *International Monetary Fund* (IMF) dan defisit serta kondisi ekonomi makro yang tidak menentu, krisis ini terjadi akibat dari kebablasan hutang yang tak terbayarkan.

Dalam sistem keuangan dan perbankan Islam didasarkan kepada: (a)Pergantian dan mekanisme bunga digantikan dengan sistem riil berbasis asset keuangan. (b)Melakukan control terhadap aktivitas ekonomi, seperti transaksi dan pembiayaan barang dan jasa. (c)Lebih mengandalkan pembagian risiko sebagai hubungan control sebaik mungkin.

Praktik lembaga keuangan Islam menunjukkan reformasi yang sesuai dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lembaga pasar keuangan.

Endnotes

¹ Guidotti, *Financial Crisis*, www.pfhub.com/financial-crisis, diakses tanggal 5 November 2012.

Daftar Pustaka

- Adel Ahmed. 2010. "Global Financial Crisis: an Islamic Finance Perspective". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 3 No. 4
- Ainley, M., et. al. 2007. *Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges*. London: Financial Services Authority

- Ali, Ahmad Mohamed. 2000. "The Emerging Islamic Financial Architecture: The Way Ahead". *Proceedings of the Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance: Dynamics and Development* Cambridge. Massachutter: Centre for Middle Eastern Studies, Harvard University
- Andrian Blundell-Wignall and Patrick Slovik. 2011. "A Market Perspective on The European Sovereign Debt and Banking Crisis". *OECD Journal: Financial Market Trends*. Vol. 2. Feb, 2011
- Ariff, Mohamed. 1988. "Islamic Banking". *Journal Asia-Pacific Economic Literature*. Vol. 2 Sep. 1988
- Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 2010. "Debt and Growth Revisited". www.voxeu.org/article/dept-and-growth-revisited#4, access Nov 9, 2012
- Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 2011. "A Decade of Debt". *National Bureue of Economic Research*. Working Paper 16827. Feb, 2011
- Cechetti, Stephen. G. 2008. "Sub-prime Series: Part 4: Does Well-Designed Monetary Policy Encourage Risk-Taking?" in Andrew Felton and Carmen Reinhart, eds. *The First Global Financial Crisis of The 21st Century*. www.voxeu.org/index.php?q=node/758.
- Easterly, William R. 1989. "Fiscal Adjustment and Deficit and Deficit Financing During the Debt Crisis." in I. Husain and I. Diwan, eds. *Dealing with the Debt Crisis*. Washington DC: The World Bank
- Georgios P. Kouretes and Prodromos Vlamis. 2010. "The Greek Crisis: Causes and Implications". *Panoeconomicus*. Vol. 4, October 2010
- Ghafour, A. 2008. "Islamic Finance Panacea for Global Crisis". *Arab New, The Middle East's Leading English Language Daily*. 23 October.
- Guidotti. 2012. "Financial Crisis". www.pfhub.com/financial-crisis. Diakses tanggal 5 November 2012
- Haidar, J. I. 2012. "Sovereign Credit Risk in the Eurozone", *World Economics*, Vol. 13 (1), January 2012
- Kayed, Rasem N. and M. Kabir Hassan. 2009. "The Global Financial Crisis and Islamic Finance Response". *University of New Orleans Working Paper*.
- Kouretas, P. Georgios, Vlamis, Prodromos. 2010. "The Greek Crisis: Cause and Implications". *Panoeconomicus*. October 27, 2010
- Muhammad Akram, Liaqat Ali, Hafsa Noreen and Monazza Karamat. 2011. "The Greek Sovereign Debt Crisis: Antecedents, Consequences and Reforms Capacity". *Journal of Economics and Behavioral Studies*. Vol. 2, No. 6. June 2011
- Nopirin. 1987. *Ekonomi Moneter*. Buku ke-II Edisi ke-Satu. Yogyakarta: BPFE
- OECD. 2010. *Economic Outlook*. France: Organization for Economic Cooperation and Development
- OECD. 2012. *OCED Economic Surveys: Euro Area 2012*. Vol. 2012. OECD Publishing
- Pakpahan, Beginda. 2011. "G-20, Eurozone dan Tantangan Ekonomi Global". *Sindo*. 7 November 2011.
- Perry, J. D Fredireck and Rehma, Scheherazade. 2011. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?". *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 1, No. 19. Dec. 2011
- Reinhart, Carmen M., and Keneth S, Rogoff. 2009. "The Aftermath of Financial Crises". *American*

Reinhart, Marmen M. and Kenneth S Rogoff. 2010. "Growth in a Time of Debt". *American Economic Review*. Vol. 100 No. 2. May 2010

Story L., Thomas L, and Schwartz N., D. 2010. "Wall St Helped to Mask Debt Fueling Europe's Crisis". <http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14dept.html>. Access Nov 13, 2012.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS